

TESIS

**KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP *SMART
CITY***

***THE STRUCTURING AND EMPOWERMENT POLICY OF
LOSARI BEACH STREET VENDORS BASED ON THE
CONCEPT OF SMART CITY***

**PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
P1300216006**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP *SMART CITY***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

KEBIJAKAN PENATANAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP SMART CITY

Disusun dan diajukan oleh

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
Nomor Pokok P1300216006

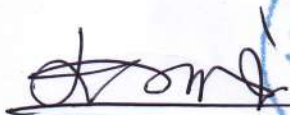
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 30 Juli 2020

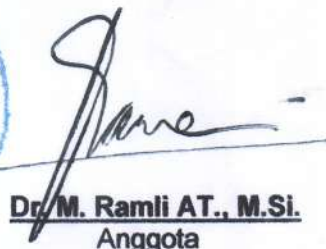
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.
Ketua



Dr. M. Ramli AT., M.Si.
Anggota

Plt. Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan



Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P.



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
Nomor Mahasiswa : P1300216006
Program Studi : Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang menyatakan



Prayudi Saputra Ahdin



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izin, rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Manajemen Perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada suri tauladan umat islam, *Rasulullah Muhammad SAW* beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan tugas ini dapat terselesaikan dengan judul “**Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep *Smart City***”. Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca budiman demi menyempurnakan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan, *aamiin*.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah-rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur atas kehadiran **Allah Subhanahu Wa Taala**, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya serta salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar **Muhammad Shallallahu'Alaihi Wassallam** yang menjadi pembawa lentera ilmu kepada seluruh umat manusia termasuk penulis.

Dalam penyelesaian Tugas akhir ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak yang telah ikhlas membantu baik secara langsung maupun tidak serta memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pribadi dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis, antara lain:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**
2. Kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**



da Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Publikasi Ilmiah,
k **Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P.**

4. Kepada orangtua penulis, Bapak **Dr. Ir. Ahdin Gassa, M.Sc.** dan Ibu **Sukmawati** yang telah memberikan doa, dukungan moril maupun materi selama masa penyelesaian studi.
5. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Perkotaan, Bapak **Prof. Dr. Ir. Slamet Trisutomo, M.S.** yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan, studi lapangan, hingga tugas akhir.
6. Kepada dosen pembimbing tugas akhir, Bapak **Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T.**, dan Bapak **Dr. M. Ramli AT., M.Si.** yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, kritikan, saran serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Kepada dosen penguji, Bapak **Mukti Ali, S.T., M.T., Ph.D**, Ibu **Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si.**, dan Bapak **Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.** yang telah memberikan masukan, kritikan, koreksi, dan saran selama proses penyelesaian tugas akhir.
8. Kepada kolega penulis yang ikut terlibat dalam penelitian ini, yaitu **Muh. Adnan Kasogi S., S.Sos., M.Si.**, **Aries Hieddin, S.Sos.**, **Arman, S.IP.**, dan **Suherman, A.Md.** yang telah memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan waktunya selama proses penelitian.
9. Kepada teman-teman angkatan tahun 2016 Program Studi Manajemen Perkotaan, yaitu **Kansip, Athirah Azis, Syahrudin M. Noor, Takdir, Arie Saputri, Anna Raehana, Melia Widya Pratiwi, Dwi Utari, Rizky Selly Nazarina Olli, Irwan,** dan **Erwin** terima kasih atas



kebersamaan, dukungan, motivasi, dan kerjasamanya selama proses studi ini sehingga menjadi pengalaman yang baru dan sangat berharga bagi penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu **Andi Fardhani, Akbar Gaffar, Muh. Aswar, Iswanto, Maslam, dan Indra Rukmana** yang telah memberikan dukungan moril.

11. Kepada pihak-pihak yang telah menjadi informan kunci dalam penelitian ini, yaitu pihak Kecamatan Ujung Pandang, pihak Kelurahan Losari, pihak Satpol PP dan pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar khususnya Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari Bapak **Nurul Akbar Nur, S.S., M.Hum.** atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Kepada pedagang-pedagang pisang epe Pantai Losari yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan kesediaannya dalam proses penelitian ini.

Makassar, Juni 2020

Prayudi Saputra Ahdin



ABSTRAK

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN. *Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep Smart City.* (dibimbing oleh Arifuddin Akil dan M. Ramli AT.)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari, menemupahami dampak kebijakan tersebut terhadap PKL, dan menjelaskan arahan pengembangan kebijakan yang berbasis konsep *smart city*.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah; analisis tematik kualitatif untuk menemupahami dampak kebijakan tersebut terhadap PKL diukur dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan; dan analisis deskriptif kualitatif komparatif untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan berbasis konsep *smart city*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan penataan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar meliputi 3 indikator, sedangkan kebijakan pemberdayaan meliputi 4 indikator. Dampak kebijakan penataan PKL menunjukkan tidak terpenuhinya kriteria kecukupan, sedangkan dampak kebijakan pemberdayaan menunjukkan tidak terpenuhinya kriteria kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Arahan pengembangan kebijakan yang berbasis konsep *smart city* terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan merekomendasikan kebijakan penataan berupa menciptakan zona spesialisasi jualan PKL, membangun ciri khas yang berbeda di setiap zona jualan, dan penataan kembali lokasi parkir kendaraan pribadi; sedangkan kebijakan pemberdayaan berupa penyediaan wastafel *portable*, menambah ukuran lapak jualan dan menerbitkan regulasi pemakaian lapak, memfasilitasi akses permodalan, menciptakan produk mandiri, serta strategi diversifikasi jualan. Kebijakan tersebut diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan regulasi yang baku dalam tata kelolanya.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima Pantai Losari.



ABSTRACT

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN. *The Structuring and Empowerment Policy of Losari Beach Street Vendors Based on The Concept of Smart City* (supervised by Arifuddin Akil and M. Ramli AT.)

The aim of this research is to describe the form of policies that has been carried out by the government in structuring and empowering the street vendors of Losari Beach, understand the impact of policies on street vendors, and explain the direction of policy development based on the concept of smart city.

This study used qualitative descriptive analysis to describe the form of policies that has been carried out by the government; qualitative thematic analysis to understand the impact of the policies on street vendors measured with six policy evaluation criteria, i.e. effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness; and a comparative qualitative descriptive analysis to explain the direction of policy development based on the concept of smart city.

The results of the research indicate that the form of the structuring policies carried out by the government includes three indicators, while the empowerment policies that have been carried out by the government include four indicators. The impact of structuring policies of street vendors indicate that the criteria for adequacy are not fulfilled, while the impact of the empowerment policies indicates that the criteria for adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness are not fulfilled. The direction of policy development based on the concept of smart city to the policies of structuring and empowering street vendors that do not meet the policy evaluation criteria recommends structuring policies by creating a selling specialization zone for street vendors, building different characteristics in each selling zone, and rearranging the location of private vehicle parking lots. Meanwhile, the empowerment policies are in the form of procurement of some portable sink, increasing the size of the sales stalls and issuing regulations on the use of stalls, facilitating capital access, creating independent products, and selling diversification strategies. By the policies, the government is expected to be able to create a standard regulation in its management.

Keywords: the impact of impact, structuring, empowerment, street vendors, Losari Beach



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMBUTAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Manajemen Perkotaan | 10 |
| 2.2. Landasan Teori dan Konsep | 17 |
| 2.2.1. Teori Perubahan Sosial | 17 |
| 2.2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Perubahan..... | 20 |
| 2.2.1.2. Teori Pertukaran Sosial | 22 |



| | |
|--|----|
| 2.2.2. Kajian Kebijakan Publik | 24 |
| 2.2.3. Konsep <i>Smart City</i> | 28 |
| 2.2.3.1. <i>Smart Governance</i> | 31 |
| 2.2.3.2. <i>Smart Branding</i> | 34 |
| 2.2.4. Kajian Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima | 36 |
| 2.2.5. Konsep Penataan dan Pemberdayaan PKL | 40 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu | 42 |
| 2.4. Kerangka Pikir Penelitian | 48 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Jenis Penelitian | 50 |
| 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 51 |
| 3.3. Objek Penelitian dan Informan | 51 |
| 3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| 3.5. Teknik Analisa Data | 54 |
| 3.6. Definisi Operasional | 61 |

BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Kota Makassar | 66 |
| 4.2. Kecamatan Ujungpandang | 67 |
| 4.3. Pantai Losari | 70 |
| 4.3.1. Letak Pantai Losari | 70 |
| 4.3.2. Sejarah Singkat Pantai Losari..... | 70 |
| 4.3.3. Aktivitas di Pantai Losari..... | 71 |

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN



| | |
|---|----|
| Bentuk Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Pada Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari | 73 |
| 1.1. Kebijakan Penataan | 81 |

| | |
|---|-----|
| 5.1.2. Kebijakan Pemberdayaan | 88 |
| 5.2. Dampak Kebijakan Terhadap Pedagang Kaki Lima | 102 |
| 5.2.1. Efektivitas | 108 |
| 5.2.2. Efisiensi | 118 |
| 5.2.3. Kecukupan | 121 |
| 5.2.4. Kesamarataan | 127 |
| 5.2.5. Responsivitas | 133 |
| 5.2.6. Ketepatan | 140 |
| 5.2.7. Analisis Teori Perubahan Sosial | 152 |
| 5.3. Arahan Pengembangan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Dengan Konsep <i>Smart City</i> | 156 |
| 5.3.1. Arahan Pengembangan Penataan..... | 162 |
| 5.3.2. Arahan Pengembangan Pemberdayaan | 164 |
| 5.3.3. Arahan Pengembangan Tambahan | 170 |
| BAB VI PENUTUP | |
| 6.1. Kesimpulan | 173 |
| 6.2. Saran | 176 |
| DAFTAR PUSTAKA | 177 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 1.1. | Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer..... | 12 |
| Tabel 1.2. | Proses Linear Aktivitas Manajemen Perkotaan | 13 |
| Tabel 2.1. | Pertanyaan Pokok dalam Kriteria Evaluasi Kebijakan | 26 |
| Tabel 2.2. | Indikator Kriteria Evaluasi Kebijakan dari Perspektif PKL..... | 27 |
| Tabel 3.1. | Indikator <i>Smart Governance</i> | 33 |
| Tabel 3.2. | Indikator <i>Smart Branding</i> | 36 |
| Tabel 4. | Pedoman penataan dan pemberdayaan PKL | 42 |
| Tabel 5. | Penelitian Terdahulu | 43 |
| Tabel 6. | Data Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang | 68 |
| Tabel 7.1. | Hasil Wawancara Kondisi Eksisting PKL Pantai Losari..... | 74 |
| Tabel 7.2. | Jumlah Pedagang kaki Lima di Pantai Losari..... | 77 |
| Tabel 7.3. | Hasil wawancara pengelolaan PKL Pantai Losari..... | 78 |
| Tabel 8. | Hasil Wawancara Kebijakan Penataan PKL yang Dilakukan oleh Pemerintah..... | 82 |
| Tabel 9. | Pemetaan masalah Penataan PKL Pantai Losari dan Pengendalian Oleh Pemerintah..... | 87 |
| Tabel 10. | Daftar Pertanyaan Bentuk Kebijakan Pemberdayaan PKL Pantai Losari yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah..... | 91 |
| Tabel 11. | Indikator Pemberdayaan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah..... | 100 |
| Tabel 12. | Bentuk Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari oleh Pemerintah..... | 101 |
| Tabel 13. | Instrumen Analisis Tematik..... | 104 |
| | 1. Daftar informan dari pedagang kaki lima..... | 105 |
| | 1.1. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan penataan terhadap PKL..... | 106 |



| | |
|--|-----|
| Tabel 15.2. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan pemberdayaan terhadap PKL..... | 107 |
| Tabel 16. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Efektivitas..... | 114 |
| Tabel 17. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Efisiensi..... | 120 |
| Tabel 18. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Kecukupan..... | 125 |
| Tabel 19. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Kesamarataan..... | 130 |
| Tabel 20. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Responsivitas..... | 137 |
| Tabel 21. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Ketepatan..... | 142 |
| Tabel 22.1. Dampak Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari | 146 |
| Tabel 22.2. Dampak Kebijakan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari | 149 |
| Tabel 23.1 Kebijakan Penataan yang Akan Dikembangkan | 157 |
| Tabel 23.2. Kebijakan pemberdayaan yang akan dikembangkan | 158 |
| Tabel 24. Indikator Konsep Smart City yang Sesuai untuk Arahan Pengembangan Kebijakan PKL Pantai Losari..... | 162 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1. Bagan Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer | 11 |
| Gambar 1.2. Proses linear aktivitas manajemen perkotaan | 13 |
| Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian | 49 |
| Gambar 3.1. Skema Proses Analisis Data Model Interaktif..... | 56 |
| Gambar 3.2. Skema Proses Analisis Tematik..... | 59 |
| Gambar 4. Bagan Alur Pikir Penelitian | 65 |
| Gambar 5.1. Peta Kota Makassar | 67 |
| Gambar 5.2. Peta Kecamatan Ujungpandang | 69 |
| Gambar 5.3. Peta Pantai Losari | 72 |
| Gambar 6.1. Peta lokasi penelitian | 77 |
| Gambar 6.2. Skema Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari | 80 |
| Gambar 7.1. Kartu identitas dan nomor seri gerobak jualan PKL resmi ... | 86 |
| Gambar 7.2. Skema Proses Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari..... | 88 |
| Gambar 8. Suasana aktivitas PKL pada malam hari..... | 93 |
| Gambar 9. Fasilitas Instalasi Listrik dan Air Bersih | 97 |
| Gambar 10. Kondisi lapak PKL di anjungan Toraja-Mandar pada pagi hari..... | 113 |
| Gambar 11. Grafik Waktu Selesai Berdagang Pedagang Kaki Lima | 117 |
| Gambar 12. Kondisi Perbedaan Intensitas Pengunjung PKL..... | 123 |
| Gambar 13. Kondisi Lapak dengan Sarana Dagangannya..... | 124 |
| Gambar 14. Salah Satu Pedagang yang Menjual Menu yang Dibatasi oleh Pengelola..... | 135 |
| 15. Salah satu pedagang yang memajang produk air mineral.... | 136 |
| 16. Contoh Wastafel <i>Portable</i> | 165 |
| 17. Contoh <i>Smart Card</i> | 167 |
| 18. Contoh Produk Mandiri | 168 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar, adalah salah satu kota metropolitan di Kawasan Indonesia Timur dengan luas wilayah mencapai 175,77 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 144 kelurahan, dengan proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 dalam data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) mencapai 1.508.154 jiwa.

Semakin metropolitannya sebuah kota maka tuntutan kebutuhan akan fasilitas sosial dan ruang publik yang berkualitas semakin meningkat. Menurut Darmawan (2005), ruang publik kota merupakan kebutuhan penting masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas ruang kota, seberapa besar fasilitas tersebut baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif tergantung dari kondisi sosial masyarakatnya. Dengan demikian semakin tinggi tingkat sosial masyarakatnya maka semakin besar tuntutan fasilitasnya.

Secara geografis Makassar adalah kota *waterfront* yang memiliki batas administrasi Selat Makassar pada bagian baratnya, dan Pantai Losari merupakan ikon kota yang sudah lama menjadi ruang publik dan objek wisata utama pada kota tersebut. Keterikatan tempat oleh masyarakat pada Pantai



ersifat emosional dan fungsional. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Heryanto dkk. (2012) menunjukkan bahwa keterikatan emosional dimiliki oleh masyarakat yang berkunjung karena memiliki nilai

simbolis dan identitas kota, sedangkan keterikatan fungsional adalah pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di tempat tersebut.

Pemanfaatan objek Pantai Losari sebagai ruang publik mengakibatkan dualisme fungsi, PKL berlomba-lomba menjadikan pantai sebagai tempat mencari nafkah dengan memanfaatkan aktivitas dan keramaian yang ada. Akibat belum adanya regulasi yang diatur secara tegas oleh pemerintah pada masa awal kemunculan PKL sampai pada periode pasca revitalisasi pantai, dan imbas dari gagalnya lokalisasi PKL di Pantai Laguna yang berdampak negatif terhadap PKL, maka PKL kembali menempati trotoar sepanjang Jalan Penghibur sehingga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas, degradasi nilai estetika dan penurunan kualitas ruang kota.

Dalam mengatasi masalah kesemrawutan pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki payung hukum yang lebih spesifik mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak diperbolehkan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang. Adapun payung hukum tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota (perwali) Nomor 44 tahun 2002 tentang "*Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar*". Salah satu lokasi yang masuk dalam kategori bebas



aktivitas PKL menurut perwali tersebut adalah sepanjang Jalan Penghibur.

Perwali tersebut diimplementasikan oleh pemerintah kota pada tahun 2014 dengan merelokasi PKL dari sepanjang trotoar Jalan Penghibur ke dalam kawasan anjungan Pantai Losari. Sejalan dengan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kota Makassar tahun 2014 - 2019 disusun dengan visi "*Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua*"; dan salah satu misi merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, dengan salah satu tujuan meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, menargetkan konsep *smart city* dalam aspek pelaksanaan pemerintahan, infrastruktur kota, lingkungan, dan keuangan yang berbasis teknologi informasi. Fokus utama yaitu perbaikan sarana fasilitas umum dan sosial serta infrastruktur kota termasuk di dalamnya jalur pedestrian yang bebas dari aktivitas PKL.

Salah satu program *smart city* yang dikonsepskan untuk permasalahan penataan PKL adalah program PKL Center. Program PKL Center sendiri adalah inovasi yang diwacanakan oleh Walikota Makassar terpilih di tahun 2014, Danny Pomanto, bahwa khusus untuk PKL Pantai Losari akan diupayakan menjadi pedagang resmi. Dalam wawancara pada media elektronik, beliau mengatakan bahwa para PKL harus menjadi pedagang dengan cara mendaftarkan diri sebagai pedagang. Pedagang harus memiliki KTP ar dan minimal sudah tinggal di kota Makassar selama 10 tahun, para yg sudah terdaftar dan telah mengisi formulir akan difasilitasi dengan



kartu *smart card*, semua pedagang resmi akan dibantu modal usaha yang bertingkat mulai yang kecil hingga yang besar (*beritasatu.com bertanggal 23 oktober 2014*). Dari artikel berita tersebut pedagang yang telah resmi akan diberi bantuan modal usaha mulai dari tingkat kecil hingga besar. Bantuan lain yang diberikan yaitu desain gerobak agar memiliki ciri kota dan nilai estetika yang kuat .

Langkah Pemkot dengan mendata PKL Losari dan menjadikan statusnya sebagai PKL resmi telah membawa harapan baru salah satunya perwakilan PKL, Babra Kamal, salah satu pendamping pedagang yang hadir menemui Walikota mengaku memberikan respon positif terhadap rencana pemerintah menjadikan PKL losari sebagai pedagang resmi. Dalam wawancara dengan media elektronik diketahui beberapa harapan pedagang seperti yang dikemukakan secara langsung sebagaiberikut:

"Memang sulit kalau tidak didata karena hampir selalu muncul pedagang baru yang tidak terdata. Apalagi kan ada rencana untuk menjadikan PKL losari sebagai pedagang resmi, mudah-mudahan ini bisa menambah penghasilan pedagang," (*www.beritasatu.com bertanggal 23 Oktober 2014*)

Tujuan PKL Losari disterilisasi dari trotoar Jalan Penghibur dan terintegrasi ke kawasan anjungan Pantai Losari selain untuk keindahan kota, adalah mencegah munculnya pasar dadakan dan sterilisasi kawasan ruang

antai Losari saat event *car free day* (CFD) yang setiap minggu pagi

Selain itu, upaya mendata PKL menjadi pedagang resmi juga



mengantisipasi kemunculan PKL baru yang tidak terdata. Dengan demikian PKL yang telah didata menjadi pedagang resmi diharapkan bisa menambah penghasilan pedagang dan menambah penghasilan asli daerah (PAD).

1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima Kota Makassar diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 1990 *Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Madya Ujung Pandang*. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah kerjanya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya (Yunus dan Insani, 2017).

Kondisi terkini Pantai Losari yaitu tahun 2019 pada saat observasi awal oleh peneliti, PKL dengan sarana jualan berupa gerobak sudah tertata terutama pada sepanjang Jalan Penghibur yang telah bebas dari aktivitas pedagang kaki lima. Lokasi baru yang diperuntukkan bagi PKL terletak di anjungan Bugis-Makassar (depan Masjid Terapung), sebagian di anjungan Toraja-Mandar, dan sebagian di tanggul ujung pantai. Adapun kewenangan dalam memberikan kebijakan dan prosedur pembinaan PKL dilakukan oleh



kecamatan Ujung Pandang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai Pengelola Pantai

Losari. Namun sampai saat penelitian ini dilakukan, pemerintah belum memiliki suatu regulasi yang tertulis secara jelas yang diterbitkan dalam tata kelola PKL di anjungan Pantai Losari, seperti pedoman kebijakan penataan dan pemberdayaan.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa keberadaan PKL di sepanjang anjungan Pantai Losari yang sekarang tidak memiliki regulasi tertulis yang diterbitkan oleh Walikota, tingkat kecamatan, maupun tingkat kelurahan, semuanya hanya berupa himbauan-himbau terkait aktivitas PKL di Pantai Losari (Nasta, 2017). Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, penetapan lokasi jualan yang ada saat ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dengan perwakilan pedagang, sehingga peneliti berasumsi bahwa kebijakan yang diberikan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada pemegang jabatan pemerintahan yang berwenang pada saat itu. Dari hasil pengamatan peneliti, tatanan PKL yang sekarang terindikasi memiliki kelemahan yang dapat mengurangi nilai estetika di dalam Pantai Losari yang merupakan *landmark* dan ikon Kota Makassar. Pada saat aktivitas berjualan, PKL masih tampil secara konservatif dengan gaya lama yaitu kemajemukan model sarana dagang seperti gerobak, pemasangan tenda - tenda yang kurang rapi, serta



an dari pedagang itu sendiri sehingga jika tidak dilakukan kebijakan lola yang tepat maka dapat berimplikasi pada munculnya wutan baru di dalam lokasi anjungan Pantai Losari itu sendiri.

Mengingat kebijakan relokasi PKL Pantai Losari yang tidak memiliki regulasi yang diatur secara jelas, maka diperlukan deskripsi bentuk kebijakan penataan dan pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini sebagai pengelola Pantai Losari. Kebijakan oleh pemerintah penting untuk dideskripsikan dan seharusnya sudah memberikan dampak kepada pedagang kaki lima sebagai aktor yang menerima kebijakan, sehingga dari mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap PKL maka dapat dirumuskan suatu arahan pengembangan kebijakan yang belum maksimal menurut PKL dengan konsep yang berbasis *smart city* agar PKL Pantai Losari yang sudah menjadi produk wisata kota, dapat tampil jauh lebih baik sesuai dengan harapan dari RPJMD Kota Makassar sebagai kota dunia, sehingga konsep *smart city* dapat menjadi solusi dan bukan sebagai wacana semata.

Oleh karena itu berdasarkan identifikasi masalah pada uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari.
2. Bagaimana dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima.



Bagaimana arahan pengembangan kebijakan PKL Pantai Losari yang berbasis konsep *smart city*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari.
2. Untuk menemupahami dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima.
3. Untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Losari yang berbasis konsep *smart city*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan IPTEKS: dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam menindaklanjuti masalah penertiban dan pemberdayaan PKL khususnya pada sektor ruang publik perkotaan serta penerapan konsep *smart city*.
2. Bagi Pemerintah Kota Makassar: dapat dijadikan masukan dan solusi dalam pengambilan kebijakan penertiban, penataan, pembinaan, dan pengembangan PKL sehingga dapat dijadikan acuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat kota Makassar, dapat memproyeksikan keadaan dan kondisi ruang publik Pantai Losari kedepannya di masa yang akan datang, yang telah digunakan oleh berbagai pihak dan kepentingan khususnya eksistensi PKL Losari.



4. Bagi komunitas PKL sebagai aspirasi dalam memahami kepentingan mereka secara holistik.

1.5 Batasan dan Lingkup Penelitian

- Batasan penelitian adalah kajian deskripsi bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan PKL Losari, dengan batasan pemerintah adalah pengelola yang berwenang dalam melakukan tata kelola PKL yaitu pihak Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, kelurahan terkait, serta Dinas Pariwisata Makassar. Sedangkan kajian dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan, peneliti menentukan batasan dari pedagang kaki lima resmi Pantai Losari yang menggunakan sarana gerobak, sedangkan PKL berkategori sebagai penjual asongan tidak akan diteliti.
- Lingkup penelitian yaitu pedagang kaki lima resmi yang menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar dan anjungan Toraja-Mandar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Perkotaan

Manajemen Perkotaan (*Urban Management*), secara umum dapat didefinisikan adalah suatu upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Dalam proses upaya ini tentu juga menginginkan adanya optimalisasi pencapaian tujuan dengan melalui tahapan yang tepat dan dilakukan secara terpadu.

Disadari bahwa pengelolaan suatu wilayah perkotaan sangat rumit dan kompleks, serta melibatkan banyak sektor, bidang dan stakeholder, namun secara umum Bidang pengelolaan perkotaan dapat dibagi menjadi 2 bidang yaitu,

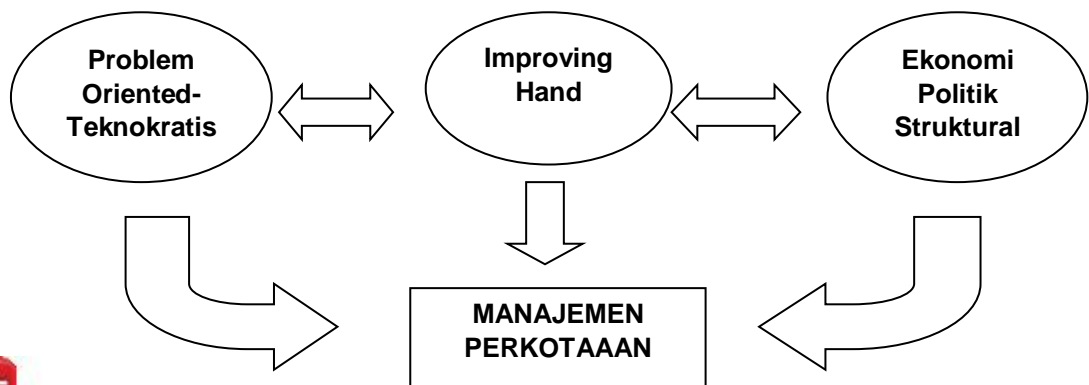
- 1) Bidang fisik, adalah segala sesuatu sumberdaya pengelolaan infrastruktur kota termasuk upaya konservasi sumberdaya alam yang berpengaruh pada pembangunan kota, sedangkan bidang
- 2) Bidang non fisik, adalah semua yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan kemasyarakatan, kelembagaan, perekonomian kota dan sistem pengawasan serta pengendalian pembangunan kota.



Manajemen perkotaan meliputi pula kesejahteraan warga kota dalam lingkup luas. Atas dasar ini fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh

manajemen perkotaan biasanya meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan kota, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan perkotaan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pelayanan-pelayanan sosial, regulasi aktifitas/perilaku masyarakat umum.

Achmad Nurmandi (2014) dalam bukunya berjudul *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*; terdapat 3 pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan kota. Pendekatan tersebut dipopulerkan oleh Lea dan Courtney membedakan dua pendekatan manajemen perkotaan yaitu pendekatan *problem-oriented teknokratis* dan pendekatan ekonomi politik struktural. Sedangkan M. Safier berusaha menengahi antara kedua pendekatan tersebut dengan konsep *improving hand* yang merupakan kompromi antara dua pendekatan yang saling bertentangan satu sama lain.



gambar 1.1. Bagan Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer (Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)



Tabel 1.1.

Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer

| Problem-oriented Teknokratis (Lea & Courtney) | Ekonomi Politik Struktural (Lea & Courtney) | Improving Hand (M. Safier) |
|--|---|---|
| Memfokuskan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan | Memfokuskan pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks struktur ekonomi politik nasional dan internasional. | Memfokuskan pada peran pemerintah kota yang proaktif dalam pemecahan masalah perkotaan. |

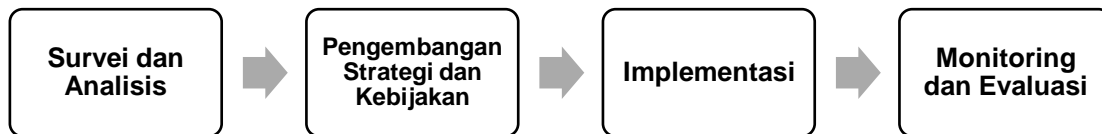
(Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)

Dalam pendekatan *improving hand*, peran pemerintah sangat besar dalam manajemen suatu kota. Pemerintah berperan untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait dan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi perkotaan.

Dari perspektif lain, Nick Devas dan Carole Rakodi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat manajemen perkotaan. Mereka mencoba menghubungkan pengertian manajemen perkotaan dari aspek perencanaan kota (*urban planning*) dan ekonomi politik.

Dari aspek perencanaan kota, manajemen perkotaan dilihat sebagai proses linier dari sejumlah aktivitas manajemen pemerintahan kota, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:





Gambar 1.2. Proses linear aktivitas manajemen perkotaan (Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)

Tabel 1.2.

Proses linear aktivitas manajemen perkotaan

| | |
|--|---|
| Survei dan Analisis | <ul style="list-style-type: none"> - Estimasi kebutuhan sekarang dan yang akan datang - Survei situasi sekarang - Analisis potensi-potensi ekonomi dan pembangunan - Identifikasi sumber daya yang ada - Evaluasi dari intervensi-intervensi yang lalu - Respon dari masyarakat |
| Pengembangan Strategi dan Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi tujuan dan objek kebijakan - identifikasi isu-isu masalah dan kunci - identifikasi alternatif strategi dan kebijakan - Analisis biaya dan keuntungan dari alternatif - Identifikasi konsekuensi dan tindakan yang diambil -Prioritas alternatif - Seleksi alternatif yang mencapai keseimbangan yang optimal antara tujuan dan penggunaan sumber daya |
| Implementasi | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi instansi-instansi pelaksan - Mobilisasi sumber daya yang diperlukan - Spesifikasi aktivitas koordinasi - Persiapan anggaran program - Spesifikasi tahapan-tahapan pelaksanaan - Spesifikasi ukuran dan target kinerja - Supervisi operasi rutin dan fungsi pemeliharaan. |
| Monitoring dan Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring teratur pada kinerja dibandingkan dengan target - Evaluasi akhir pada kinerja dan dampak - Umpan balik dari hasil ke dalam langkah awal melalui system informasi efektif. |

diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)



Kriteria untuk mengevaluasi kinerja manajemen kota antara lain:

1. Perbaikan standar hidup

- Diversifikasi sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan konsumsi, kemudian juga untuk menunjang investasi dalam rangka memperbaiki produksi
- Produsen berkompetisi secara efektif dalam rangka menyediakan barang dan jasa bagi konsumen
- Sumber daya digunakan dan ditangani secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Pemerataan dan keadilan

- Pemerataan berarti cost and benefit didistribusikan secara merata, namun tetap secara khusus memperhatikan yang lemah dan tidak beruntung
- Keadilan pada prinsipnya tidak ada pembatasan dan diskriminasi serta memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok karakter
- Keadilan juga berarti bahwa ada kesamaan penanganan bagi semua dalam memperoleh pelayanan umum (keadilan horisontal).

3. Sustainabilitas lingkungan



- Konservasi sumber daya yang langka atau tidak dapat diperbaharu (non-renewable) dan menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan cara berkelanjutan
- Meminimalkan dampak pembangunan dan kegiatan pada situasi ekologi yang rawan
- Meminimalkan resiko perubahan negatif yang tidak bisa diperbaiki, misalnya rusaknya lapisan ozon, global warming, terjadinya bencana alam dan sosial
- Meminimalkan polusi udara, air, tanah
- Menjamin sistem pasokan sumber daya yang dibutuhkan secara cukup dan berkelanjutan

4. Pemenuhan hak asasi yang bertanggung jawab

- Kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, berbicara, beribadah dan berserikat
- Kebebasan individu untuk memilih dalam menggunakan waktu dan uang, dalam konsumsi, bekerja, tinggal, dsb
- Kebebasan personal dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, self-realisation, self-esteem and dignity, kreatifitas, identitas budaya, community



Kebebasan berpolitik

Jaminan keamanan dan keselamatan, serta hak atas property

5. Pengimplementasian kebijakan

- Efektif dalam aspek kapasitas administrasi dan sumber daya
- Adanya organisasi tata kelola yang transparan
- Upaya implementasi termanifestasikan dalam aspek kemauan politik

6. Pengatasan konflik dan ketidakpastian

- Pengatasan konflik antara keadilan sosial dengan mekanisme pasar, antara pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan, antara modernitas dengan tradisi.
- Memperhatikan keakuratan dan kelengkapan data dan kebenaran proses analisis untuk meminimalkan ketidakpastian. (Nick Devas & Carole Rakodi, 1993, *diposkan oleh Manajemen Perkotaan Pasca UNHAS pada 19 November 2014*)



dasan Teori dan Konsep

Landasan teori dalam penelitian ini adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang relevan dalam penelitian ini. Adapun teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Teori Perubahan Sosial

Definisi perubahan sosial dikutip dari Nanang Martono (2014) oleh beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

- 1) Kingsley Davis: perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- 2) Mac Iver: perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan.
- 3) Moore: perubahan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial meliputi pola-pola perilaku dan interaksi yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Indikator pada struktur sosial yang mengalami perubahan terdiri dari beberapa tipe yaitu: (1) perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru yang bersifat gradual dan tidak banyak unsur-unsur baru maupun unsur-unsur lama yang



(2) perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur berkaitan dengan apa dan

bagaimana masyarakat melakukan, (4) perubahan dalam hubungan struktur berbeda, (5) kemunculan struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya (Harper dalam Martono, 2014: 5-6).

Salim menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung perubahan sosial disebut sebagai *five contemporary prime mover* (lima faktor penggerak kontemporer): (1) proses komunikasi dan perkembangan industri pers, (2) birokrasi, (3) modal dalam perkembangan ekonomi, (4) teknologi, (5) ideology (Martono, 2014: 24).

Beberapa dampak positif perubahan sosial diantaranya (1) manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya, (2) integrasi sosial semakin meningkat, (3) kualitas individu masyarakat semakin baik seiring perkembangan teknologi, (4) mobilitas sosial semakin cepat, (5) pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya.

Adapun beberapa dampak negatif perubahan sosial diantaranya: (1) peningkatan angka kemiskinan, (2) jumlah pengangguran semakin tinggi, (3) peningkatan angka kriminalitas, (4) terjadi konflik sosial, (5) individualitas semakin meningkat, (6) pencemaran lingkungan.

Sztompka mengemukakan mengenai perubahan revolusi dalam masyarakat menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas yang
uh semua tingkat dan dimensi masyarakat. Perubahan yang
akan, yaitu perubahan yang terlebih dahulu direncanakan oleh
rak yang hendak mengadakan perubahan yang dinamakan *agent of*



change. *Agent of change* adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin pada lembaga kemasyarakatan (Martono, 2014).

Setiap upaya menciptakan perubahan sosial memerlukan suatu strategi tertentu, dan strategi perubahan sosial yang dipopulerkan oleh Lauer dan Harper (Martono, 2014) yaitu:

- 1) Strategi Fasilitatif, yaitu agen bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi, dan sebagai sarana konsultasi.
- 2) Strategi Reedukatif, yaitu strategi ini digunakan apabila adanya ditemukan hambatan-hambatan sosial budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi
- 3) Strategi Persuasif, strategi ini berupaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan, dan lebih tepat diterapkan apabila suatu masyarakat tidak menyadari akan kebutuhannya untuk berubah atau mempunyai perhatian yang rendah untuk berubah.



strategi Kekuasaan, yaitu strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman.

- 5) Strategi Kekerasan dan Nonkekerasan, strategi ini bersifat fleksibel tergantung dari situasi yang dialami masyarakat. Strategi kekerasan dianggap sebagai strategi alternatif terakhir. Sedangkan nonkekerasan berupa musyawarah, metode demokratis, kritik, persuasi, serta pendidikan

2.2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses Perubahan

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi dalam perubahan sosial. Istilah pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pengertian menurut konteks budaya dan politik. Oleh karena itu, makna pemberdayaan tidak mudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas (Martono, 2014).

Ife (dalam Martono, 2014) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta

siyasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu

Menurut Suharto (dalam Martono, 2014), pemberdayaan menunjuk



pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom).
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik. Lingkungan strategik yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi (Joni dkk., 2014)

2.2.1.2. Teori Pertukaran Sosial (Peter M. Blau)



Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi *do ut des*, yaitu saya memberi supaya engkau memberi. Teori pertukaran pada dasarnya

menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan negara. Peter M. Blau memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi-relasi di antara individu, dengan kata lain pemikiran Blau memiliki analisa tingkah laku dasar individu ke dalam analisa struktur sosial yang lebih kompleks.

Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas kepada tingkah-laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada imbalan lagi (Raho, 2007: 176). Dalam kelompok-kelompok kecil, anggota-anggota kelompok bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi dalam kolektivitas yang lebih luas, tidak ada interaksi langsung di antara anggota-anggotanya karena itu harus diciptakan sarana atau mekanisme yang bisa mengantarai interaksi mereka. Sarana atau mekanisme tersebut adalah berupa norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi alat pertukaran. Kalau norma adalah alat pertukaran antara individu dan masyarakat, sedangkan nilai (value) adalah alat pertukaran antara kelompok dan kelompok dengan kolektivitas.

Nilai-nilai dari berbagai jenis dapat dipandang sebagai media atau alat transaksi sosial. Peter M. Blau (dalam Raho, 2007) membagi nilai-empat tipe dasar yaitu: (1) nilai-nilai yang bersifat khusus atau r, yaitu media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat



yang berfungsi mempersatukan kelompok ke dalam; (2) nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu standard-standard yang bersifat umum, yang berdasarkan standard itu sebuah pertukaran tidak langsung bisa dilakukan; (3) nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, yaitu memberikan legitimasi atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan kontrol sosial; dan (4) nilai-nilai oposisi, yaitu memberikan kemungkinan penyebarluasan perasaan akan perlunya perubahan yang jauh lebih efektif daripada penyebaran melalui kontak pribadi antara orang-orang untuk melawan keteraturan yang sudah mapan.

Berdasarkan konsepsi di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah dan PKL mempunyai hubungan pertukaran yang berbeda. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menata dan menertibkan PKL, sedangkan dari pihak PKL mempunyai kepentingan mengenai pendapatan dan keuntungan. Agar menjembatani kepentingan di antara kedua belah pihak, maka kebijakan-kebijakan penataan dan pemberdayaan menjadi nilai sebagai media transaksi sosial. sehingga upaya tersebut dianggap bisa menjawab keinginan setiap pihak.

PKL sebagai aktor yang menerima berbagai kebijakan, sudah semestinya menimbulkan perubahan struktur sosial dengan terjadinya



i sosial berupa imbalan-imbalan yang diterima dari pemerintah bentuk pertukaran sosial dan bagaimana upaya pemerintah dalam akan pemberdayaan pada komunitas PKL. Oleh karena itu agar

penelitian ini bersifat ilmiah maka peneliti akan menganalisa dan mendefinisikannya ke konsepsi perubahan sosial PKL dan menghubungkannya dengan perubahan tingkah laku PKL akibat dampak-dampak kebijakan yang terjadi yang akan diklasifikasikan ke 4 tipe nilai pertukaran menurut Peter M. Blau.

2.2.2. Kajian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mencakup tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa dampak / akibat atau konsekuensi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan umumnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Handoyo, 2013).

Konsekuensi atau dampak suatu kebijakan dapat diketahui dan diukur keberhasilannya melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) dapat dinilai dengan 6 kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*), adalah apakah alternatif atau kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari adakannya tindakan.



2. Efisiensi (*efficiency*), adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari aspek moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*), adalah seberapa jauh tingkat efektivitas memenuhi dan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kesamarataan (*equity*), adalah akibatnya secara adil didistribusikan seperti berkaitan dengan distribusi kesamarataan pendapatan, pendidikan yang erat dengan keadilan dan kewajaran.
5. Responsivitas (*responsiveness*), adalah seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai kelompok masyarakat. Kriteria ini adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan, sehingga responsivitas mengandung pertanyaan praktis apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*), adalah berkaitan dengan nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan program tersebut, dengan kata lain kriteria ini mempertanyakan apakah program tersebut tepat untuk masyarakat.



Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria ini memiliki nilai dan tolok ukur yang berbeda-beda, dan kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif. Kriteria-kriteria evaluasi dapat dijelaskan dengan pertanyaan pokok sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pertanyaan pokok dalam kriteria evaluasi kebijakan

| No. | Kriteria | Pertanyaan |
|-----|---------------|---|
| 1. | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? |
| 2. | Efisiensi | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? |
| 3. | Kecukupan | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? |
| 4. | Kesamarataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? |
| 5. | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? |
| 6. | Ketepatan | Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? |

(William Dunn, 1999: 610)

Dari tinjauan tentang kebijakan dan bagaimana mengevaluasi suatu kebijakan, maka untuk mengukur dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah menurut pedagang, setiap kriteria dapat

ikan sebagai berikut:



Tabel 2.2. Indikator kriteria evaluasi kebijakan dan definisi dari perspektif Pedagang Kaki Lima

| No | Kriteria | Definisi |
|----|---------------|--|
| 1. | Efektivitas | Apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL. |
| 2. | Efisiensi | Apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh |
| 3. | Kecukupan | Apakah efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat memuaskan kebutuhan PKL. |
| 4. | Kesamarataan | Apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada setiap PKL. |
| 5. | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan oleh pemerintah diterima dengan baik oleh PKL. |
| 6. | Ketepatan | Apakah tujuan kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan manfaat atau tepat guna yang diterima oleh PKL |

(Sumber: diolah dari data sekunder)



2.2.3. Konsep Smart City

Dari beberapa literature dapat diartikan *smart city* sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energy, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinergi-nya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota (Esabella, 2016).

Dari faktor manusia kota cerdas mengacu kepada sebuah kota yang didukung oleh manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaannya, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas kriminal (Florida dalam Nurmandi, 2014). Kota cerdas juga mengacu kepada kota yang memiliki manusia, pendidikan, learning dan pengetahuan menjadi unsur penting kota cerdas. Infrastruktur sosial dan intelektual yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kekayaan sosial, kekayaan budaya dan potensi ekonominya (Bartlett dalam Nurmandi, 2014).

Giffinnger dan Cohehen (dalam Tahir & Harakan, 2015) menjelaskan bahwa dalam perwujudan suatu konsep *smart city* dalam implementasi terhadap 6 sumbu tersebut, diperlukan suatu tolok ukur yang menghitung

ai keberadaan smart city : (1) *Smart Living*, (2) *Smart Governance*,
rt Economy, (4) *Smart Mobility*, (5) *Smart Environment*, (6) *Smart*



Konsep Smart City Kota Makassar

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014 - 2016, pemerintah kota mengusung visi “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”; dan salah satu misi merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, dengan salah satu tujuan meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Implementasi konsep tersebut adalah perpaduan dua nilai antara smart dan *sombere'* yang dapat dianalogikan seperti perangkat keras dan perangkat lunak. *Smart* adalah pengertian luas dari pembangunan yang dapat terlihat, sedangkan *sombere'* adalah kearifan lokal masyarakat Makassar. Secara umum, gagasan kota pintar di Kota Makassar mengacu pada perspektif sosioteknik. Perspektif ini memahami bahwa kota pintar tidak hanya didefinisikan dalam penggunaan alat informasi dan teknologi tetapi juga penggunaan artefak informasi dan teknologi dalam konteks sosial dan organisasi yang lebih luas (Madani & Nasrulhaq, 2017).

Secara garis besar proyek Sombere' & Smart City Makassar terdiri dari enam modul, yaitu:



Smart governance, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dari pemerintah kota;

- 2) *Smart branding*, untuk meningkatkan kesadaran terhadap karakter kota, terutama untuk pariwisata;
- 3) *Smart economy*, untuk membangun ekosistem yang baik dan mendorong less cash society;
- 4) *Smart living*, untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan;
- 5) *Smart society*, untuk membangun masyarakat yang interaktif dan humanis;
- 6) *Smart environment*, untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah serta menciptakan sumber energi yang lebih baik.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Madani dan Nasrulhaq (2017),,, *sombere'* (sikap ramah) dan tata kelola yang cerdas adalah prioritas utama dalam pengembangan Kota Makassar menuju kota dunia yang didesain khusus untuk mengatur urusan publik menjadi lebih baik. Dengan tujuan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi dengan budaya lokal. Konsep tata kelola yang cerdas di Makassar berfokus pada tiga aspek, yaitu layanan publik, manajemen birokrasi, dan efisiensi kebijakan.



alam kajian ini penulis berkesimpulan bahwa pemerintah merupakan ublik yang diadakan untuk melayani kepentingan publik. Pedagang

kaki lima dalam perspektif kebijakan publik adalah pihak yang seharusnya dilayani dan pemerintah memberikan pelayanan melalui kebijakan. Adapun konsep *smart city* merupakan inisiatif yang bersifat solutif dan memiliki peluang untuk diimplementasikan sesuai dengan permasalahan pada suatu daerah. *Smart city* adalah konsep kota cerdas dengan terintegrasinya 6 modul / aspek tersebut melalui wadah teknologi informasi. Namun dalam penelitian ini, konsep *smart city* digunakan peneliti untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari dengan harapan memperbaiki tata kelola, tatanan dan tampilan PKL menjadi jauh lebih baik sesuai dengan harapan RPJMD Kota Makassar sebagai kota dunia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep *smart city* yang sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari adalah *smart governance* untuk memperbaiki tata kelola PKL, dan *smart branding* untuk memperbaiki tampilan PKL sehingga dapat menciptakan karakter yang kuat khususnya sebagai produk wisata kota.

2.2.3.1. *Smart Governance*

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari tah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi an kota. Sehingga *smart governance* di dalam dimensi *smart city*



merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan akselerasi terhadap perubahan tersebut. *Smart governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Tujuan dari *smart governance* adalah terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif. Untuk mewujudkan hal tersebut inisiatif pembangunan *smart governance* dilakukan indikator sebagai berikut:



Tabel 3.1. Indikator *Smart Governance*

| Pelayanan Publik (Public Service) | Manajemen Birokrasi yang Efisien | Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy) |
|--|---|--|
| Pelayanan administrasi masyarakat: SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, KTP, sertifikata tanah dll. - Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan pokok masyarakat. - Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan jasa masyarakat. | - Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggungjawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). | -Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. - Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. |

(Sumber: Diskominfostandi Kota Bogor, 2017)

Meijer dan Bolivar (2016) mengklasifikasikan tipe ideal mengkonseptualisasikan tata kelola yang cerdas tentang peran pemerintah dalam masyarakat modern, sebagai berikut:

1) Pemerintahan kota cerdas (*government of a smart city*)

Jenis pertama konseptualisasi tata kelola yang cerdas menunjukkan tidak perlu transformasi struktur dan proses pemerintahan. Dalam konseptualisasi ini, tata kelola yang cerdas hanyalah tata kelola kota yang cerdas: tata kelola yang cerdas adalah tentang membuat pilihan kebijakan yang tepat dan mengimplementasikannya secara efektif dan cara yang efisien.



2) Pengambilan keputusan yang cerdas (*smart decision-making*)

Jenis konseptualisasi tata kelola cerdas yang kedua menekankan kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan yang cerdas dan penerapan keputusan ini. Meijer dan Bolivar (2016) memenuhi syarat konseptualisasi ini pada tingkat transformasi yang rendah karena ini bukan tentang merestrukturisasi organisasi atau institusi pemerintah tetapi itu menekankan perlunya merestrukturisasi pengambilan keputusan. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintah dengan menggunakan lebih banyak informasi yang lengkap dan lebih tersedia dan mudah diakses untuk proses pengambilan keputusan dan penerapan keputusan ini.

Dari kajian tersebut penulis berkesimpulan bahwa *smart governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan kinerja pemerintahan yang cepat, efektif, efisien dan komunikatif. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat 3 indikator penting yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2.2.3.2. *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *smart city* adalah *smart branding*, yaitu branding yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing



daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart branding menjadi salah satu dimensi dalam *smart city* karena di dalam era informasi seperti saat ini, suatu kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal saja, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pemilik modal dan investor untuk ikut mendorong akselerasi pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya *income* dan *profit* perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan *branding* dilakukan pada beberapa indikator yaitu membangun dan rkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*), serta membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*).



Tabel 3.2. Indikator *Smart Branding*

| <i>Tourism Branding</i> | <i>Business Branding</i> |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan ✓ Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan ✓ Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah ✓ Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif ✓ Membangun dan memasarkan produk dan jasa industry kreatif daerah misalnya kuliner. |

(Sumber: Diskominfostandi Kota Bogor, 2017)

2.2.4. Kajian Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal (*Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, 2009: 2*)

Lahirnya sektor informal secara konseptual dapat dijelaskan salah satunya melalui teori *excess of labor supply approach* yang dijelaskan oleh

lan Buvinic. Menurut teori ini, berkembangnya sektor informal adalah an terhadap keterbatasan sektor formal dalam menyerap excess kerja. Hal ini terjadi karena kemampuan yang terbatas pada pasar



tenaga kerja formal. Disebutkan sektor formal cenderung menggunakan tenaga kerja terdidik disertai dengan persyaratan keahlian tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal akan mencari usaha alternatif yang lebih mudah, yaitu sektor informal (Pitoyo, 2007).

Breman (dalam Suraji, 2013) menemukan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

- 1) Modal pada umumnya kecil.
- 2) Tingkat produktivitasnya rendah.
- 3) Skala usaha kecil.
- 4) Tingkat pendidikan pelakunya rendah.
- 5) Menggunakan teknologi sederhana.
- 6) Sifat kepemilikan bersifat tunggal dan menggunakan tenaga kerja dari lingkungan keluarga.
- 7) Mudah masuk keluar pasar.
- 8) Kurang mendapat dukungan/penerimaan dari pemerintah.

Hidayat (dalam Suraji, 2013) memutuskan 3 definisi kerja tentang sektor informal sebagai berikut :



sektor informal adalah sektor yang tidak menerima proteksi pemerintah.

2. Sektor ini belum dapat menggunakan bantuan meskipun Pemerintah telah menyediakannya, karena tidak mampu.
3. Sektor yang telah menerima bantuan, tetapi belum sanggup membawa sektor ini mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam memahami sektor informal kriteria yang dipakai cukup baik dalam arti bukan pada formalitas ada atau tidaknya bantuan yang diberikan pemerintah, melainkan fokusnya berfungsi pada *criteria accessibility* bagi sektor informal terhadap penggunaan yang telah disediakan pemerintah.

Pedagang Kaki Lima

Secara terminologi, istilah kaki lima sendiri pertama kali dikenal pada masa pemerintahan kolonial Gubernur Jenderal Raffles ketika mengeluarkan peraturan lalu lintas, bahwa jalur berukuran *five feet* (lima kaki = 150 cm = 1,5 m) di sepanjang kanan-kiri jalan ditetapkan fungsinya sebagai jalur pedestrian, kemudian munculnya orang-orang yang menjajakan dagangannya dengan gelaran dan gerobak dorong di sepanjang kanan kiri jalan tersebut yang kemudian pedagang tersebut dinamakan sebagai pedagang kaki lima (Susilowati dkk., 2014).



edagang kaki lima menurut beberapa peneliti adalah suatu usaha memerlukan modal relatif sedikit yang melakukan kegiatan usaha

pedagang perorangan atau kelompok yang menjalankan usahanya menggunakan lokasi-lokasi strategis seperti fasilitas-fasilitas umum, trotoar jalan, pinggir jalan umum, dan lain-lain dengan ciri-ciri kegiatan organisasi tidak terorganisir, tidak mempunyai izin usaha, tidak memerlukan keahlian khusus dan pendidikan tinggi bagi pedagang, dan hasil produksi dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi sektor informal yang bercirikan modal relatif kecil dengan produktivitas rendah, pelaku umumnya berpendidikan rendah sehingga mudah digeluti karena tidak memerlukan keahlian khusus. Dari segi operasionalnya ada yang bersifat legal/resmi dan liar yang menempati posisi strategis perkotaan umumnya pada fasilitas umum terutama di jalur pedestrian, dan sarana berdagang pada umumnya dengan gerobak yang memudahkan mobilitas umumnya pedagang ini bersifat tidak menetap.

Pada penelitian ini, pedagang kaki lima yang diamati adalah PKL yang berjualan di anjungan Pantai Losari yang dari segi operasionalnya telah bersifat resmi/legal, teregistrasi, dan diakui oleh pemerintah. Tempat operasionalnya diatur dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang ditentukan pemerintah, akan tetapi sarana berjualan masih bersifat *movable*

tidak akan gerobak dorong dan terjadwal secara menetap.



konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima terdiri dari penguatan identitas pedagang kaki lima sebagai identitas kota, penataan lapak PKL, pengaturan aktivitas PKL dan penataan parkir (Brotosunaryo dkk., 2013). Sedangkan Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya (Permendagri no. 41, 2012).

Sektor informal yang menjadi ciri khas kota-kota besar di Indonesia apabila ditata dengan baik akan layak dijadikan objek wisata. Penataan itu tidak sekedar penataan fisik dan kebersihan, namun juga masalah keamanan. Penataan dengan menonjolkan aspek lokal dapat menjanjikan dan memiliki daya tarik tersendiri. Glokalisasi adalah upaya menampilkan unsur lokal pada tingkat global dengan cara-cara tertentu. Agar dapat mencapai sukses dalam percaturan global, dapat ditonjolkan keunikan lokal suatu produk (Alpriyana, 2009).

Konsep penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia tur dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012* “*Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”, pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai penataan lokasi tempat



kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Pada Bab III pasal 8 diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara: (1) Pendataan PKL, (2) Pendaftaran PKL, (3) Penetapan Lokasi PKL, (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan (5) Peremajaan lokasi PKL.

Sedangkan pedoman dalam pemberdayaan, *Bab IV pasal 40* menjelaskan mengenai Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain: (1) peningkatan kemampuan berusaha, (2) fasilitasi akses permodalan, (3) fasilitasi bantuan sarana dagang, (4) penguatan kelembagaan, (5) fasilitasi peningkatan produksi, (6) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan (7) pembinaan dan bimbingan teknis. Permasalahan pedagang kaki lima yang harus diatasi oleh pemerintah adalah ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk PKL yaitu (1) dalam bidang produksi dan pengolahan, (2) bidang pemasaran, (3) bidang sumber daya manusia, dan (4) bidang teknologi (Joni dkk., 2014). Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti menggunakan Permendagri no. 41 Tahun 2012 sebagai



untuk mendeskripsikan indikator penataan dan pemberdayaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam tata kelola PKL Pantai

Tabel 4. Pedoman penataan dan pemberdayaan PKL

| Variabel | Indikator |
|--------------------------|---|
| <i>Penataan PKL</i> | (1) Pendataan PKL, (2) Pendaftaran PKL, (3) Penetapan Lokasi PKL, (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan (5) Peremajaan lokasi PKL. |
| <i>Pemeberdayaan PKL</i> | (1) peningkatan kemampuan berusaha, (2) fasilitasi akses permodalan, (3) fasilitasi bantuan sarana dagang, (4) penguatan kelembagaan, (5) fasilitasi peningkatan produksi, (6) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan (7) pembinaan dan bimbingan teknis. |

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai kebijakan pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dampak-dampak kebijakan, maupun penggunaan konsep *smart city* dalam pengembangannya. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.

Penelitian Terdahulu


| No | Judul Penelitian | Permasalahan | Tujuan Penelitian | Metode | Kesimpulan |
|----|--|---|--|--|---|
| 1. | <i>Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Laguna)</i> - Deka Alpriyana, 2009. | Penyesuaian diri terhadap lokasi dan kondisi baru memerlukan waktu bagi PKL agar menemukan cara yang efektif dalam mempromosikan penjualannya. Lokasi baru yang disebut Pantai Laguna jauh berbeda dengan lokasi sebelumnya dengan kondisi yang agak terisolasi, lokasi kios yang berbentuk blok-blok membuat PKL tidak semua dapat dijangkau dengan mudah. | 1. Untuk menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perpindahan lokasi berjualan terutama pada sektor sosial ekonomi PKL 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap eksistensi para PKL | Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, informan dipilih secara <i>accidental sampling</i> , analisis data dengan metode statistic deskriptif dan analisis dengan Uji Korelasi Bivariat. | Relokasi PKL dari Jl. Metro Tanjung Bunga ke kawasan Pantai Laguna sebagai salah satu pusat jajanan dan berfungsi sebagai objek wisata kuliner dianggap gagal dan tidak mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan kota karena banyaknya sejumlah PKL yang gulung tikar. |
| 2. | <i>Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Mahardika (Kajian Kebijakan Penataan Pemerintah Kota Ambon)</i> - Fientje Palijama, 2013. | Pasar Mahardika merupakan sentral pasar di kota Ambon yang mengalami kehancuran akibat konflik horizontal, serta keterbatasan pemerintah dalam penyediaan dana untuk membangun kios baru mengakibatkan munculnya PKL liar di sudut kota. | Mengidentifikasi sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan PKL pada Pasar Mahardika Kota Ambon. | Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Kebijakan penataan dan pembinaan PKL belum berlangsung dengan baik karena belum terbentuknya wadah profesi PKL, kurangnya pencarian mitra usaha, dan kurangnya sosialisasi tentang keindahan dan ketertiban kota. |
| 3. | <i>Strategi Penataan dan Pengembangan mal ang - unaryo</i> | Bertambahnya PKL dapat mengakibatkan bertambahnya permasalahan lalu lintas di Kota Semarang, tetapi jika ditata dengan baik maka dapat menjadi pemasukan daerah dan menjadi objek wisata untuk membentuk identitas kota. | Untuk menentukan strategi penataan dan pengembangan PKL di Kota Semarang. | Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kuantitatif berdasarkan sampel kuesioner dan kualitatif berdasarkan wawancara dan data sekunder. | Perencanaan sektor informal sebagai bagian dari perencanaan kota Semarang sangat penting dilakukan, karena terdapat hubungan harmonis antara pedagang PKL dan warga masyarakat Semarang |



| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 4. | <i>Konsep Smart City dan Pengembangan Pariwisata di Kota Malang - Wiwin Purnowati & Ismini, 2014.</i> | Pemerintah Kota Malang mempersiapkan SDM dan iptek untuk mewujudkan konsep Smart City, namun pengertian Smart City yang diimplementasikan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi sehingga lebih tepat disebut sebagai digital city. | 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai Smart City 2. Memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan pariwisata di Kota Malang. | Deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Program-program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Malang <i>smart city</i> antara lain adalah pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi, penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan RTH 30% dan lain-lain untuk meningkatkan potensi wisata Kota Malang. |
| 5. | <i>Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar - Abdul Rachim Rauf, 2011.</i> | Meningkatnya pedagang kaki lima di daerah perkotaan memberikan dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang ditimbulkan adalah lokasi yang ditempati tidak teratur sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, namun pemerintah selalau berusaha mencari jalan keluarnya. | 1. Untuk mengetahui dasar pemikiran pemerintah sehingga ditetapkan Pantai Losari sebagai tempat sementara para pedagang kaki lima. 2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari | Deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Dasar pemikiran pemerintah sehingga Pantai Losari dijadikan sebagai tempat pedagang kaki lima adalah karena usaha ini dapat membantu Dispenda melalui pajak penjualan dan retribusi. Peranan pemerintah dalam pembinaan adalah pemeberian izin usaha, memberkan peringatan dan tindakan hukum, melakukan pemupukan modal, bantuan kebersihan dan kesehatan penyuluhan dan bimbingan. |
| 6. | <i>Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di</i> | Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Pontianak Timur, namun aktifitas mereka cenderung di tempat-tempat yang tidak seharusnya | Untuk mengetahui kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peran Pemerintah Kota Kecamatan Pontianak Timur dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. | Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. | Hubungan interaksi sosial antara PKL dan pemilik modal formal terjalin akrab dan saling menguntungkan, sedangkan Permebedayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena belum ada pola pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu sehingga usaha Pedagang kaki Lima dapat terlaksana secara optimal. |



Timur -
arjono,
n, dan
BSEP,

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| 7. | <i>Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang</i> - Esmara Sugeng & Anik Kunantiyorini, 2016. | Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan upaya penataan PKL ke kawasan alun-alun, namun masih terdapat sebagian besar PKL yang masih menempati ruang-ruang kawasan yang tidak diperbolehkan. Dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL pemerintah membuat payung hukum Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui keselarasan pengaturan dan penataan PKL dengan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Batang 2. Menganalisis upaya pemberdayaan PKL sebagai usaha kecil dalam mengembangkan usahanya 3. Menemupahami manfaat kebijakan yang diterapkan kepada PKL. | Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan <i>sosio legal research</i> . | Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima agar selaras dengan Tata Ruang wilayah Kabupaten Batang belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Karena tidak memiliki data yang valid mengenai jumlah PKL, upaya pemberdayaan sebatas pada pengadaan <i>shelter</i> PKL pada alun-alun Kota Batang dan <i>shelter</i> Pujasera Kalisari. Kebijakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaat oleh PKL karena beberapa kendala eksternal dan internal. |
| 8. | <i>Penertiban Pedagang Kaki Lima Menuju Makassar Kota Dunia</i> - Muchlas M. Tahir & Rikasari, 2016. | Dampak dari otonomi daerah yang paling pesat berkembang di Kota Makassar yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima. Tahun ini fokus pembangunan Makassar berada pada infrastruktur, harus didukung dengan tata ruang melalui penertiban PKL guna memudahkan pemerintah dalam menata Kota Makassar. | Menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menuju Kota Dunia. | Deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. | Pemerintah dalam beberapa hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan di emperan toko Jalan Raya dan tempat umum yang lainnya |
| 9. | <i>Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota</i>  Yunus ni, | Keberadaan PKL Pantai Losari cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Makassar dan menjadi salah satu sumber PAD, namun jumlah mereka bertambah setiap tahunnya. | Menganalisis tata kelola pedagang kaki lima khususnya pedagang pisang epe Pantai Losari Makassar. | Kuantitatif dengan survey, analisis data dengan statistic deskriptif tabulasi silang sederhana. | Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik, namun pemerintah juga harus meminimalisir jumlah pedagang kaki lima di pantai losari, karena tiap tahunnya akan semakin bertambah untuk kedepannya dapat mengembangkan bisnis kuliner |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | | | tradisional sehingga berkontribusi pada bisnis wisata. |
| 10. | <i>Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang</i> - Nurani Nurul Hidayati & Hadi Wahyono, 2013. | Dalam menangani masalah PKL dengan bidang penataan kota, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali mengambil tindakan yang kurang menguntungkan bagi pedagang sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas kota. | Untuk mengkaji dampak kebijakan penataan PKL yang ada pada kawasan Jalan Kartini Kota Semarang menurut pemerintah dan persepsi PKL. | Metode kualitatif dengan <i>purposive sampling</i> , analisis data deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, dan <i>thematic analysis</i> . | Terdapat perbedaan dampak kebijakan menurut pemerintah dan PKL. Pada kriteria efisiensi PKL menilai belum mencukupi karena tidak pro rakyat, sedangkan menurut pemerintah kebijakan dianggap sesuai karena PKL berjualan di tempat yang seharusnya agar mendapat pelayanan layak dari pemerintah. |



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memfokuskan kepada deskripsi bentuk kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari. Penulis menganalisa pentingnya mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima Losari, menganalisa dampak apa saja dari kebijakan tersebut terhadap PKL sehingga output dari penelitian ini adalah menyusun arahan pengembangan kebijakan tersebut guna mendukung RPJMD Kota Makassar dalam mengimplementasikan konsep *smart city* Makassar menuju kota dunia khususnya pada aspek tata kelola PKL.

Adapun kesamaan pada penelitian sebelumnya yang relevan yaitu *Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar* oleh Abdul Rachim Rauf (2011), persamaan ada pada deskripsi peranan pemerintah pada pembinaan PKL Pantai Losari. Namun perbedaan pada penelitian tersebut adalah rentang waktu saat penelitian dilakukan, kebijakan pengelolaan PKL saat penelitian ini sudah beralih ke Dinas Pariwisata sehingga terdapat beberapa pembaruan kebijakan-kebijakan.

Berdasarkan penelusuran studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang menganalisa tata kelola PKL, namun analisis tentang kebijakan penerapan konsep *ty* dalam mengatasi permasalahan sektor informal khususnya PKL temukan.



2.4. Kerangka Pikir Penelitian

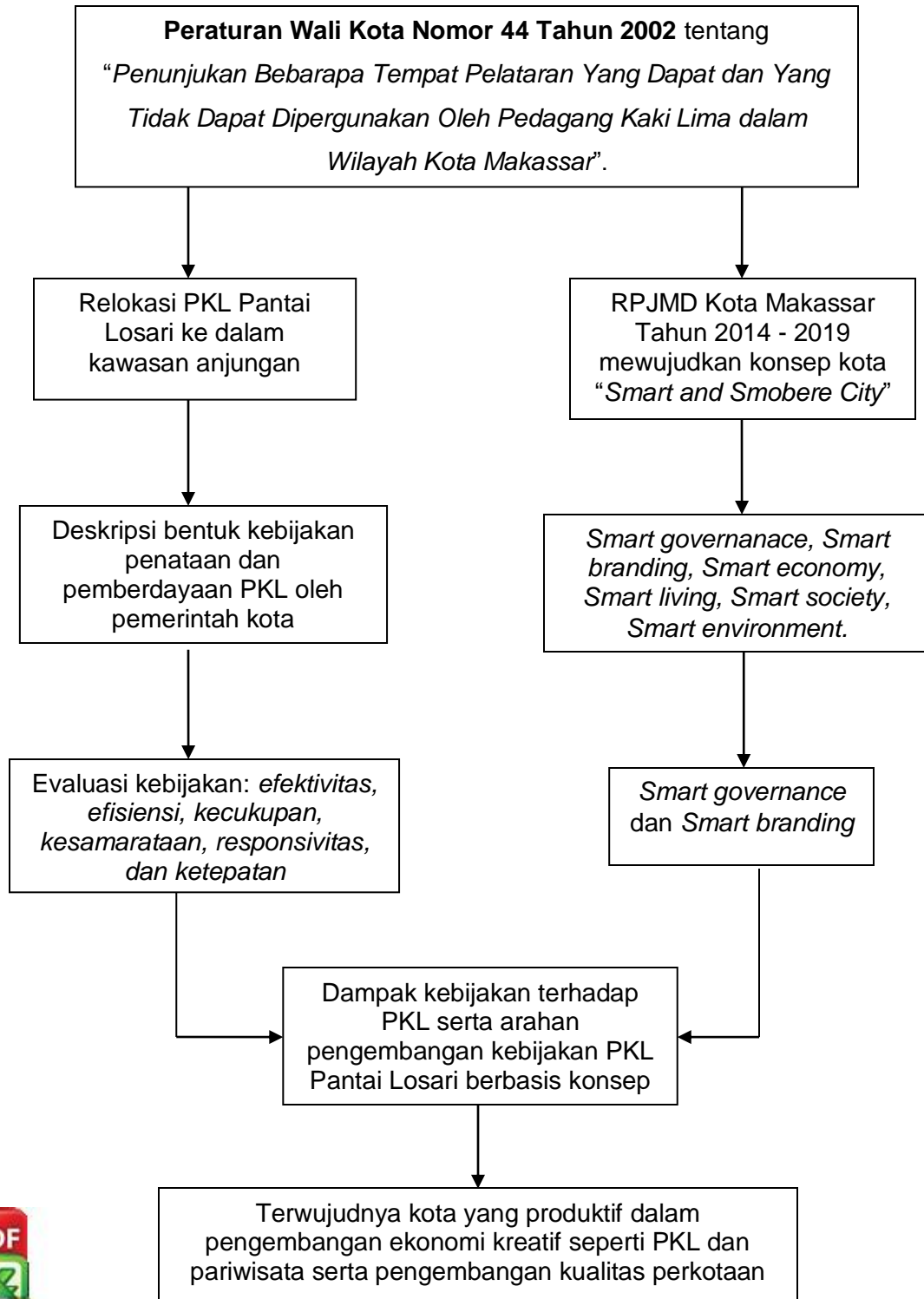
Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah yang telah diamati oleh penulis. Relokasi PKL dilakukan ke dalam kawasan anjungan Pantai Losari yang merupakan bentuk implementasi Perda Walikota Nomor 44 Tahun 2002 yang melarang adanya aktivitas PKL di trotoar Jalan Penghibur.

Pada penelitian ini penulis mengamati terjadinya kesemrawutan baru di kawasan aktivitas PKL di anjungan dikarenakan model PKL yang masih tradisional atau konservatif dan cenderung mengurangi nilai estetika di dalam ruang publik. Oleh Karena itu diperlukan analisis deskripsi kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari, dari deskripsi tersebut berlanjut dengan menemupahami dampak kebijakan terhadap PKL dikarenakan PKL merupakan pihak yang menerima kebijakan dari pemerintah, dengan cara diklasifikasikan ke dalam 6 kriteria evaluasi kebijakan sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui kirteria apa saja yang telah memberikan dampak positif dan negatif kepada PKL.

Dari hasil deskripsi dampak kebijakan, maka dapat ditemukan kebijakan-kebijakan yang belum memenuhi kriteria evaluasi sehingga output



nelitian ini yaitu menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penguatan berbasis *smart city* yang relevan yaitu *smart governance* *irt branding*.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

